

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu fenomena kompleks karena berkaitan dengan permasalahan sosial dan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia kemiskinan merupakan keadaan seseorang atau individu yang dimana tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan standar hidup yang layak dan memadai yang diukur melalui pengeluaran pada barang dan jasa yang dibutuhkan (BPS, 2023).

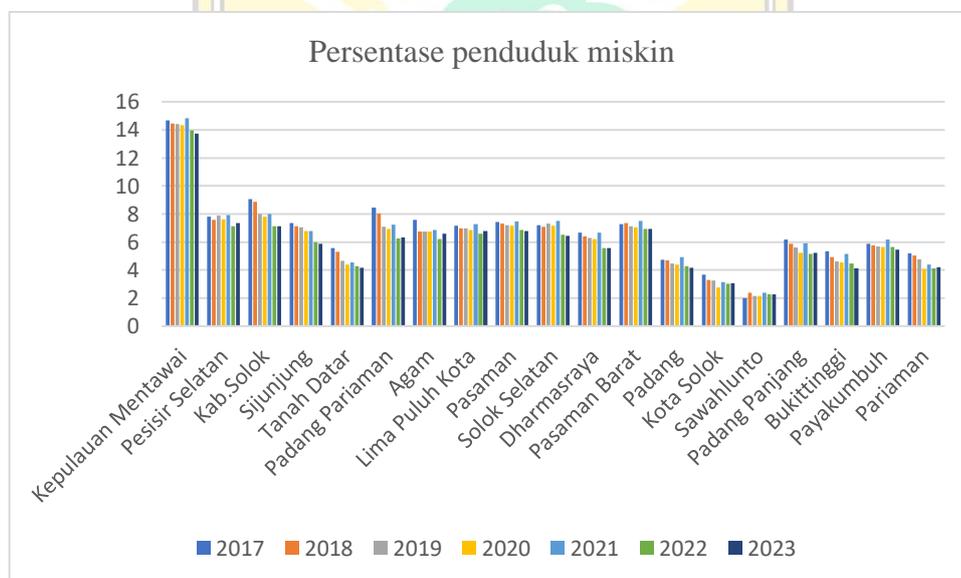
Kemiskinan telah menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan dalam bidang sosial ekonomi. Kemiskinan harus dihadapi oleh semua pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk miskin di suatu negara akan mengakibatkan beban ekonomi makro yang berat. Hal ini menurunkan kualitas hidup penduduk karena terbatasnya kemampuan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, hampir semua pemerintahan di dunia berupaya untuk meminimalkan jumlah penduduk miskin guna mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyatnya (Feryanto et al., 2020).

Peningkatan jumlah penduduk menuntut banyaknya lapangan pekerjaan yang harus tersedia sehingga mendukung peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai peningkatan kesempatan kerja dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan baru (*ceteris paribus*) yang kemudian berdampak pada peningkatan potensi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan bisa dijadikan tolak ukur apakah pembangunan suatu wilayah dalam keadaan stagnasi, atau bahkan resesi. Selain itu, dari tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, kita juga dapat mengetahui sejauh mana kesenjangan distribusi pendapatan sosial di negara tersebut (Anjas et al., 2024). Sehingga pengangguran, upah, dan pertumbuhan ekonomi berperan mempengaruhi tingkat kemiskinan yang terjadi. Ketiganya saling terkait dan berkontribusi pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, inflasi, serta rendahnya pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan mendasar yang semakin kompleks dalam pembangunan global,

permasalahan ini merupakan isu kontemporer yang sangat sulit diatasi di Indonesia (Prasetyo et al., 2022).

Masalah kemiskinan di Sumatera Barat perlu untuk dikaji serta ditelaah. Hal ini disebabkan adanya fluktuasi yang terjadi pada tingkat dan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2023 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pengangguran yang meningkat, upah yang kenaikannya tidak terlalu signifikan dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami masa resesi. Sehingga masalah tentang kemiskinan di Sumatera Barat sangat menarik untuk dikaji dan diteliti.

Grafik 1. 1 Penduduk Miskin Sumatera Barat tahun 2017-2023 (persen)



Sumber : BPS Sumatera Barat

Menurut BPS Sumatera Barat seperti yang diperlihatkan di grafik 1.1 persentase penduduk miskin di Sumatera Barat menurut Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang mendominasi tingkat persentase tertinggi penduduk miskin di Sumatera barat periode tahun 2017-2023. Jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat sendiri pada tahun 2017 sebesar 364,51 ribu jiwa dengan persentase 6,87 % akan tetapi pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami kenaikan

di angka 370,67 ribu jiwa dengan persentase 6,63 % dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 335,21 ribu jiwa dan 5,92 % dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan dimana jumlah penduduk miskin berada pada angka 340,37 ribu jiwa dan persentase sebesar 5,95%. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Akan tetapi, jumlah angka penduduk miskin pada tahun 2021 bertambah cukup signifikan yakni mencapai 370,67 ribu jiwa. Masalah kemiskinan dengan segala kerumitan permasalahan di dalamnya tidak hanya dilihat dari kekurangan materi semata. Akan tetapi, telah menciptakan pola-pola sosial yang baru di dalam masyarakat. Masalah kemiskinan telah menjadi isu yang kronis dalam suatu negara. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di setiap wilayah akan tetapi tingkat kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya (Zunaidi et al., 2023).

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur sejauh mana pekerja tidak mampu berintegrasi ke dalam pasar tenaga kerja. Tingginya tingkat pengangguran yang tidak diungkapkan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pekerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Meskipun tingkat pengangguran di Indonesia menurun, ketimpangan masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pengangguran terbuka dapat berkontribusi terhadap kemiskinan, karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai sumber pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi yang pada akhirnya memperburuk keadaan kemiskinan di masyarakat (Soylu et al., 2018).

Upah yang terjadi di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2017-2023 diketahui tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada setiap tahun dan upah rata-rata di setiap Kab/Kota yang ada cenderung pada keadaan stagnasi. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor yang membuat perekonomian tidak berjalan dengan semestinya salah di antara penyebabnya yaitu Sumatera Barat masih bergantung pada sektor-sektor ekonomi tradisional seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata, yang cenderung memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan sektor industri atau teknologi. Hal ini membatasi kemampuan

sektor swasta untuk meningkatkan upah secara signifikan. Selain itu, infrastruktur di beberapa Kab/Kota di Sumatera Barat masih terbilang kurang memadai, yang membatasi arus investasi baru. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya jumlah perusahaan besar atau industri yang dapat memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerja (BPS Sumatera Barat, 2023).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2017-2023 mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya terbilang stagnan. Akan tetapi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kemunduran yakni berada pada -1,61 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 yakni 3,29. Pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat dapat mengatasi masalah kemiskinan karena sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat bahkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Kemiskinan di Sumatera Barat tidak hanya mengarah pada masalah ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial seperti ketimpangan sosial, ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat. Banyak keluarga yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional, yang sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, wilayah pesisir menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan minimnya akses terhadap pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di Sumatera Barat dan menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyebab dan dampak kemiskinan di Provinsi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat. Meskipun kemiskinan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam pengentasan kemiskinan masih tetap besar. Oleh karena itu, untuk menganalisa masalah ini diperlukan penelitian dengan tema “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini akan menggunakan data tahun 2017-2023”.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, masalah tentang kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang cukup kompleks. Masalah kemiskinan, secara garis besar dialami oleh setiap Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat yang masyarakatnya memiliki keberagaman dan juga kebanyakan bekerja di sektor informal, menimbulkan berbagai tingkat pendapatan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakmerataan dalam pendapatan, sehingga masalah kemiskinan tidak bisa terhindari di Sumatera Barat. Isu tentang pengangguran yang ada diduga menjadi salah satu faktor terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan. Sedangkan upah belum jelas apakah mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut secara signifikan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi dianggap dapat menekan angka kemiskinan yang ada. Maka isu yang menarik untuk dikaji dan dijawab yaitu bagaimana pengaruh pengangguran, upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap masalah kemiskinan di Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu mengkaji suatu fenomena permasalahan kemiskinan yang terjadi di Sumatera Barat. Penelitian ini menelaah dan mengkaji dampak pengangguran terbuka, upah, dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sumatera Barat dan pengaruhnya terhadap masalah kemiskinan. Secara garis khusus, penelitian bertujuan untuk melihat sejauh mana pengangguran, upah serta pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penulis dapat melihat seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka, upah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Sumatera Barat pada periode 2017-2023.
2. Penulis juga dapat menambah wawasan dan serta pengetahuan bagi pembaca sehingga bisa dijadikan referensi untuk melihat penyebab kemiskinan di Sumatera Barat periode 2017-2023.

3. Penelitian ini penulis lakukan untuk dapat memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bagi Pemerintah Sumatera barat diharapkan bisa mengambil penelitian ini sebagai bahan acuan untuk mengambil langkah dan tindakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

